

BAB 4

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1.1 Kesimpulan: Motif Ekonomi-Politik Pemerintah Kanada

Sebelum penulis mengambil kesimpulan, berikut ini akan diberikan ringkasan mengenai beberapa hal penting yang perlu dicatat:

- Pro-kontra mengenai asbes putih terjadi di tingkat internasional antara pendukung industri asbes yang dimotori oleh Kanada dengan organisasi-organisasi internasional lainnya seperti serikat buruh internasional BWI. Pemerintah Kanada dan pendukung industri asbes putih melakukan kampanye '*safe use of asbestos*' sementara organisasi yang menentang asbes putih melakukan kampanye '*ban on asbestos*'.
- Dalam Kampanye '*safe use of asbestos*', pemerintah Kanada mendukung dan membiayai institusi pro-asbes seperti *the Chrysotile Institute*, memanipulasi laporan ilmiah organisasi internasional, melawan negara lain untuk melarang penggunaan asbes putih melalui WTO, menolak dimasukkannya asbes putih ke dalam daftar PIC dari Konvensi Rotterdam, mendukung berdirinya serikat buruh tandingan *International Alliance of Chrysotile Trade Unions* dan melobi pemerintah negara pengimpor dan institusi lainnya, serta menyelenggarakan '*scientific symposium*' di beberapa negara untuk mendukung asbes putih.
- Sistem pemerintahan parlementer, pluralisme partai politik dan pemilihan umum yang lebih menguntungkan partai politik kedaerahan, serta hadirnya Bloc Quebecois sebagai '*swing power*', membuat 2 partai politik besar (partai Konservatif dan Liberal) tidak mampu mencapai mayoritas kursi di *the House of Commons*. Oleh karena itu, untuk membentuk pemerintahan -mayoritas semu atau minoritas- yang stabil diperlukan dukungan partai lain (baca: Bloc Quebecois) di *the House of Commons*.

- Bentuk negara Federal yang sangat terdesentralisasi membuat semua kebijakan negara tidak mungkin dibuat tanpa persetujuan propinsi dan teritori.
- Propinsi Quebec yang memiliki jumlah penduduk yang banyak, bahasa yang berbeda (Perancis), budaya yang unik dan sebagainya menuntut kedaulatan dari negara Kanada melalui gerakan kedaulatan-asosiasi (*sovereignty-association*).
- Referendum ke-2 yang meminta dukungan warga Quebec terhadap Undang-undang '*The Act*' yang memberi otorisasi kepada *The National Assembly* Quebec untuk menyatakan kedaulatan, mendapat dukungan suara sebesar 49,4%. Hanya dibutuhkan 0,6% suara lagi dari warga Quebec, agar propinsi Quebec menjadi negara yang berdaulat.
- Tuntutan kedaulatan Quebec tersebut mulai memuncak sejak terjadinya '*The Quiet Revolution*' pada tahun 1960-an yang memiliki visi '*maitre chez nous*' (menjadi tuan di rumah sendiri), yang melihat negara sebagai alat untuk meningkatkan status ekonomi dan identitas budaya mereka.
- *The Quiet Revolution* diilhami dari mogok para pekerja tambang asbes putih yang sebagian besar adalah orang-orang Quebec berbahasa Perancis (sementara pemilik pertambangan adalah orang-orang Kanada berbahasa Inggris) pada tahun 1949.
- Industri asbes kemudian menjadi semacam '*cause celebre*' atau kemenangan yang patut dirayakan oleh orang Quebec karena berhasil menasionalisasi (baca: menjadi milik pemerintah Quebec) industri asbes dari tangan orang-orang Kanada yang berbahasa Inggris. Sehingga setiap upaya untuk mengusik industri asbes akan diidentikkan dengan mengusik semangat nasionalisme warga Quebec.

- Asbes putih yang sudah ditambang sejak tahun 1879 di wilayah Quebec telah memberikan sumbangan pembangunan yang sangat besar bagi Quebec dan menjadi bagian penting dari sejarah Quebec misalnya dengan penamaan kota di Quebec seperti kota Asbestos dan Thetford Mines.
- Sejalan dengan semangat nasionalisme, pemerintah Quebec melalui badan usaha milik negara seperti *'the Societe Nationale de l'Amiante'*, menasionalisasi atau menanamkan investasi di beberapa perusahaan yang berkaitan dengan industri asbes putih. Selain itu, ternyata bahan tambang asbes di Quebec, berada di deposit batuan yang kaya akan magnesium.
- Pertambangan asbes putih selama 125 tahun telah merusak permukaan tanah, menyebabkan polusi serta meninggalkan 3,5 milyar ton sampah yang mengandung asbes putih di Quebec.¹ Selain itu, yang lebih fatal adalah setiap tahun terdapat sekitar 65-70 orang Kanada yang menderita kanker mesothelioma dan 130-140 orang menderita kanker paru akibat asbes putih. Sayangnya informasi tentang jumlah penderita dan data statistik lainnya sulit untuk diakses masyarakat.
- Upaya untuk menutup tambang asbes dan mengembalikan lingkungan hidup seperti semula, akan menimbulkan biaya yang sangat besar dimana industri asbes putih tersebut tidak akan mampu untuk mengatasinya. Wilayah tambang asbes di Quebec berada di daerah *'mono-industry rural zone'* artinya suatu daerah pinggir kota yang hanya memiliki satu jenis industri & masyarakat sepenuhnya bergantung pada industri tersebut.
- Karena masa inkubasi asbes putih yang lama (sekitar 15-20 tahun), maka standar *'kenormalan'* masyarakat pertambangan menurun secara perlahan sebelum menyadari bahwa segalanya sudah terlambat. Untuk kasus asbes putih dibutuhkan waktu selama 119 tahun bagi pekerja tambang asbes agar tuntutan kompensasi bagi para penderita penyakit akibat asbes putih diakui oleh Undang-undang dan dimenangkan oleh pengadilan.

¹ Disampaikan pada International Global Asbestos Congress yang diadakan di Jepang pada tanggal 19-21 November 2004

Ringkasan penjelasan tersebut membawa penulis kepada kesimpulan dan jawaban terhadap motif ekonomi-politik pemerintah Kanada dalam mengambil kebijakan untuk terus mendukung ekspor dan penggunaan asbes putih, sebagai berikut:

1. Motif utama dari pemerintah Federal Kanada dalam mengambil kebijakan luar negeri untuk terus mendukung ekspor asbes putih dan penggunaannya di tingkat internasional didorong oleh kepentingan untuk menjaga keutuhan negara Kanada, mencegah propinsi Quebec untuk memisahkan diri dari negara Federal Kanada dan menunjukkan kepedulian pemerintah Federal Kanada terhadap warga Quebec yang mayoritas berbahasa Perancis.
2. Isu asbes putih menjadi dilema bagi pemerintah Federal Kanada karena di satu sisi pemerintah Federal Kanada tidak ingin warga negaranya terkena resiko penyakit akibat asbes putih tetapi di sisi lain pemerintah Federal Kanada harus mempertahankan lapangan pekerjaan dan sumber penghasilan bagi warga Quebec. Oleh karena itu ekspor asbes putih adalah jalan keluar yang paling '*rasional*' bagi pemerintah Federal Kanada untuk mendapatkan keduanya sekaligus.
3. Sistem politik parlementer, bentuk negara Federal, tingkat desentralisasi yang tinggi kepada propinsi dan teritori, serta pluralisme partai politik mengakibatkan pemerintahan di tingkat Federal Kanada sangat tergantung kepada partai politik (terutama yang memiliki basis di suatu wilayah) di *the House of Commons*. Akibatnya, setiap partai politik berusaha mendapatkan suara sebanyak-sebanyaknya untuk memenangkan Pemilu. Bloc Quebecois mampu memainkan perannya sebagai '*swing power*' antara 2 partai besar yang bersaing yaitu partai Konservatif dan Liberal untuk membentuk pemerintahan Federal Kanada yang stabil, tentunya dengan konsesi yang salah satunya adalah perlindungan dan subsidi bagi industri asbes putih.

4. Pemerintah Federal Kanada tidak mungkin menutup industri asbes karena keterkaitan antara industri asbes putih dengan sejarah nasionalisme bangsa Quebec serta kepemilikan saham pemerintah Quebec dalam industri asbes putih melalui badan usaha milik negara seperti '*the Societe Nationale de l'Amiante*', '*The Caisse de Depot and Placement in Quebec*' (dana pensiun pegawai negeri dan pekerja Quebec), '*The Regime de rentes du Quebec*' dan '*The Societe Generale de Financement du Quebec*'.
5. Karena penutupan industri asbes putih tidak mungkin dilakukan dan biaya '*recovery*' pertambangan asbes putih tidak mungkin lagi ditanggung maka pilihan yang lebih menguntungkan bagi pemerintah Federal Kanada adalah mengambil manfaat sebesar-besarnya dari industri tersebut. Salah satunya adalah dengan mengambil kandungan magnesium dari tailing asbes putih.
6. Pemerintah Kanada lebih memilih untuk mengambil kebijakan ekspor asbes putih dan menghadapi kecaman dari organisasi-organisasi internasional karena resiko yang ditanggung Kanada di tingkat internasional tidak sebesar resiko yang ditanggung di tingkat domestik jika industri asbes putih ditutup. Pemerintah Kanada mampu memanfaatkan kelemahan dari polemik penelitian ilmiah tentang sifat '*carcinogenic*' dari asbes putih, rendahnya standar kesehatan kerja dan masyarakat di negara-negara berkembang dan miskin, serta aturan perdagangan internasional.

4.2 Rekomendasi & Pelajaran yang Bisa Diambil Pemerintah Indonesia

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Indonesia sebagai negara pengimpor ke-8 terbesar di dunia memiliki posisi yang sangat penting bagi produsen asbes putih seperti Kanada karena potensi penggunaan asbes putih di Indonesia yang sangat besar. Indonesia juga memiliki posisi penting sebagai negara yang paling berpengaruh di kawasan ASEAN (*Association of South East Asian Nations*) sehingga kebijakan luar negeri Indonesia untuk melarang impor dan penggunaan asbes putih akan memiliki efek domino ke kawasan ASEAN. Lebih dari 8 juta rumah tangga dan 5,5 juta pekerja konstruksi di Indonesia beresiko menggunakan produk-produk yang mengandung asbes putih seperti semen-asbes, partisi dinding, bahan insulasi, pipa air, suku cadang kendaraan bermotor dan lain-lain. Produk-produk berbahaya tersebut dipakai secara luas tidak hanya di rumah-rumah tetapi juga di bangunan milik pemerintah, infrastruktur, sekolah, mesjid bahkan rumah sakit dan kendaraan bermotor.

Indonesia sudah memakai asbes putih sejak tahun 1959, 50 tahun yang lalu. Ini artinya penderita penyakit akibat asbes putih sudah mulai bermunculan. Profesor Faisal Yunus, Ketua Asosiasi Dokter Paru Indonesia (*The Indonesian Society of Respirology - ISR*) mengatakan bahwa banyak kasus penderita asbestosis dan mesothelioma di Indonesia tidak dapat dideteksi sebagai penyakit akibat terpapar asbes putih. Hal ini disebabkan kesadaran dokter di Indonesia tentang penyakit akibat asbes putih yang rendah dan keterbatasan peralatan medis yang menyebabkan diagnosa pada penderita penyakit tersebut akhirnya diarahkan kepada penyakit akibat asap rokok dan polusi udara. Profesor Faisal Yunus juga menyatakan bahwa pemeriksaan kesehatan yang pernah dilakukan oleh ISR terhadap para pekerja di perusahaan semen-asbes tidak boleh dipublikasikan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia untuk menghindari kepanikan publik dan tuntutan kompensasi dari para pekerja dan masyarakat yang dirugikan.

Mengambil pelajaran dari kasus di Kanada, berikut ini adalah beberapa rekomendasi untuk pemerintah Indonesia;

1. Segera menghentikan penggunaan dan impor asbes putih di Indonesia sebelum epidemi penyakit akibat asbes putih meluas dan tidak mungkin lagi diatasi karena biaya yang besar, serta mempersiapkan terjadinya epidemi penyakit akibat asbes putih di Indonesia dengan menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai.
2. Meratifikasi Konvensi ILO no. 162 tahun 1986 tentang Asbes dan Konvensi ILO no. 139 tahun 1974 tentang Penyakit Kanker akibat Pekerjaan, serta membuat Program Rencana Kerja untuk Menghapuskan Penyakit Akibat Asbes atau '*National Action Program for Elimination of Asbestos-related Diseases*' (NPEAD) di Indonesia. Indonesia juga harus mendukung dimasukkannya asbes putih ke dalam daftar PIC dari Konvensi Rotterdam.
3. Menghentikan dukungan pemerintah terhadap industri asbes putih dan FICMA dan melakukan transisi industri asbes putih kepada industri lainnya yang lebih aman. Melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan informasi yang benar dan tidak menghalang-halangi tuntutan kompensasi bagi para pekerja industri asbes putih yang menderita penyakit akibat pekerjaannya tersebut, serta membuat rencana transisi pekerjaan yang adil bagi para pekerja.
4. Memberikan penyadaran dan informasi yang benar kepada para pekerja dan masyarakat tentang bahaya asbes putih misalnya dengan mencantumkan label yang jelas pada produk-produk yang mengandung asbes putih dan bahayanya terhadap kesehatan.
5. Merevisi Undang-undang no. 18 tahun 1999 yang telah memasukkan Amphibole dan Crocidolite ke dalam kategori bahan-bahan beracun berbahaya dengan menambahkan Chrysotile (asbes putih).
6. Melaksanakan peraturan pemerintah No. 74 tahun 2001 tentang manajemen bahan-bahan beracun dan berbahaya terhadap produk-produk asbes putih yang saat ini telah digunakan dan rencana pembongkaran produk-produk tersebut di seluruh Indonesia.

7. Merevisi Keputusan Presiden no. 22 tahun 1993 yang sudah mengakui bahwa penyakit asbestosis, kanker paru dan mesothelioma sebagai penyakit akibat hubungan kerja dengan mencantumkan Chrysotile (asbes putih) sebagai penyebabnya.
8. Merevisi Peraturan Tenaga Kerja no. 03 tahun 1985 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja akibat pemakaian asbes dengan memperpanjang masa klaim kompensasi dari 5 tahun setelah berhenti bekerja menjadi sedikitnya 20 tahun setelah berhenti bekerja.

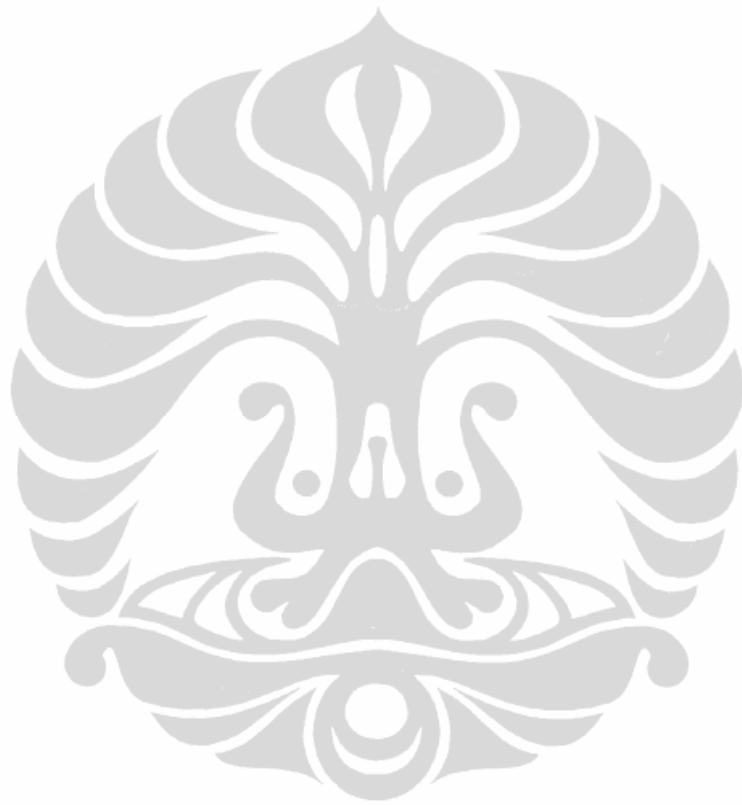
Penelitian lebih lanjut tentang motif ekonomi-politik pemerintah Indonesia untuk terus mendukung penggunaan dan impor asbes putih juga sangat menarik untuk dilakukan guna melengkapi Tesis ini, karena walaupun pemerintah Kanada dan Indonesia sama-sama memiliki kebijakan luar negeri untuk mendukung penggunaan dan ekspor (untuk Kanada)/ impor (untuk Indonesia) asbes putih, tetapi kebijakan tersebut didorong oleh faktor-faktor domestik yang berbeda.

Beberapa faktor domestik di bawah ini dapat digunakan sebagai informasi awal bagi penelitian lebih lanjut tentang motif ekonomi-politik yang mendorong pemerintah Indonesia mengambil kebijakan luar negeri untuk terus mendukung penggunaan dan impor asbes putih;

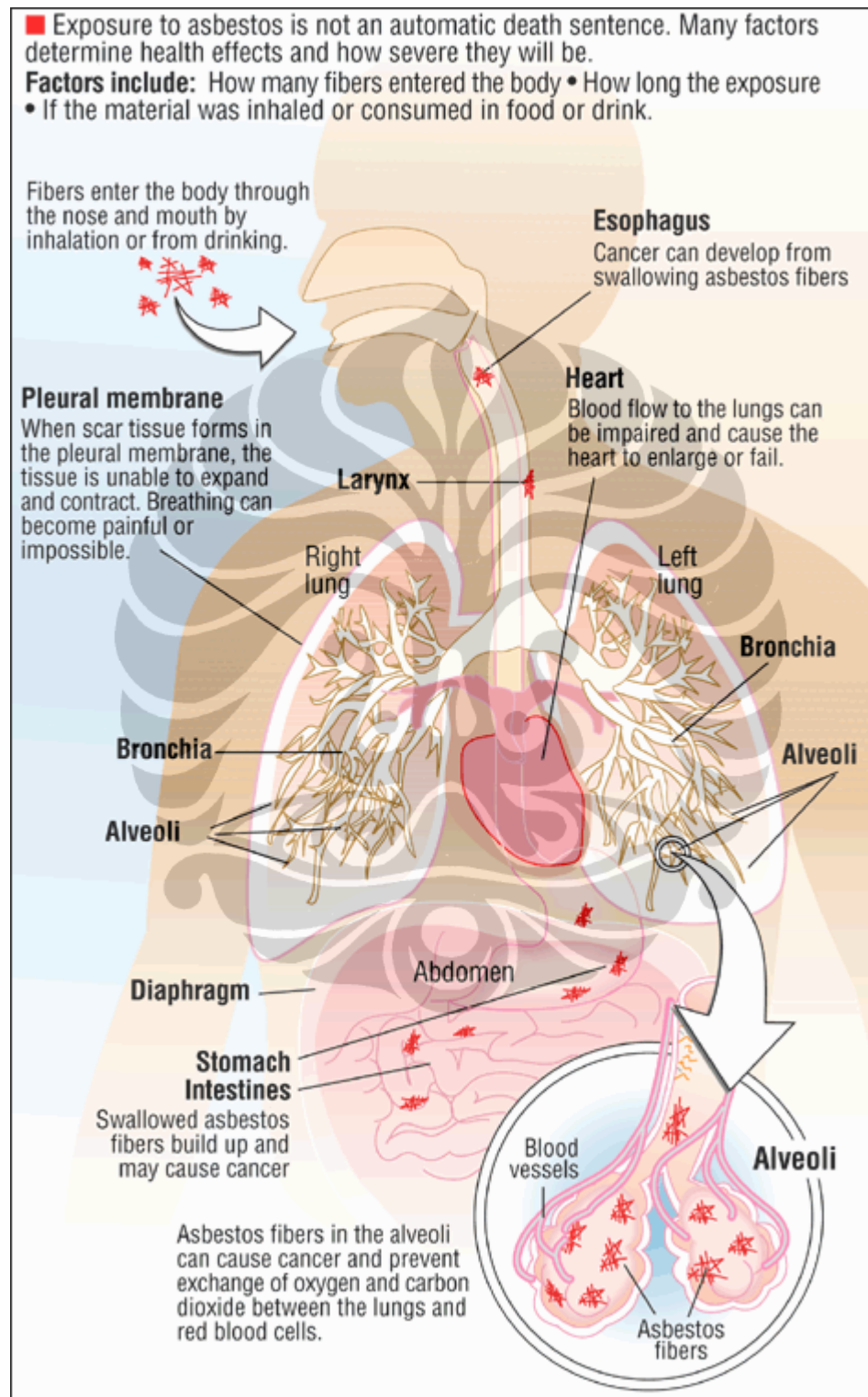
1. Karena harganya yang relatif murah dan terjangkau masyarakat, maka produk-produk yang mengandung asbes putih mendukung program pemerintah Indonesia untuk menyediakan sebanyak mungkin kebutuhan dasar bagi masyarakat terhadap rumah murah.
2. Walaupun Indonesia tidak memiliki tambang asbes putih dan semua bahan mentah asbes putih diimpor dari Rusia dan Kanada, tetapi di Indonesia terdapat 26 perusahaan yang memproduksi bahan bangunan dan suku cadang kendaraan bermotor yang masih menggunakan asbes putih dan mempekerjakan sekitar 7.233 orang.
3. Dr. Haryono, MSc mewakili APINDO- Asosiasi Pengusaha Indonesia dan DK3N (Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional), dalam seminar nasional FKUI SBSI tentang Asbes putih di Jakarta (2007) menyatakan bahwa asbes tidak berbahaya bagi kesehatan asal digunakan

melalui prosedur yang benar. Beliau juga menyatakan dukungannya terhadap industri ini dan meminta pemerintah Indonesia untuk tidak melarang penggunaan dan impor asbes putih. Hal ini juga disampaikan Dr. Haryono kepada Kedutaan Besar Indonesia di Swiss dan delegasi Indonesia pada Konferensi ILO tahun 2006 terhadap rencana dikeluarkannya Resolusi ILO yang lebih tegas tentang asbes putih.

4. Dua perusahaan asbes putih terbesar di Indonesia dimiliki oleh Bakrie Building Industries (BBI). BBI dimiliki oleh orang terkaya di Indonesia (versi majalah Forbes tahun 2007) dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, Aburizal Bakrie. Aburizal Bakrie juga menjabat sebagai Presiden FICMA (*Fiber Cement Manufacturer Association*) yang didukung oleh *The Chrysotile Institute* – Kanada. Aburizal Bakrie juga telah mendukung kampanye Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dari partai Golkar pada tahun 2003. Melalui Bakrie Foundation, Menteri Kesejahteraan Republik Indonesia memberikan ‘*bantuan kemanusiaan*’ kepada korban bencana alam di Indonesia berupa produk-produk bahan bangunan yang mengandung asbes putih. Salah satu contohnya, adalah pembangunan 240 rumah untuk korban gempa dan tsunami di distrik Syah Kuala, Banda Aceh dimana lantai, dinding, plafon dan atap rumah tersebut dibuat dari bahan-bahan yang mengandung asbes putih.



Lampiran 1. Asbes putih dan bahayanya bagi tubuh manusia



Sumber: The Asbestos Cancer Epidemic

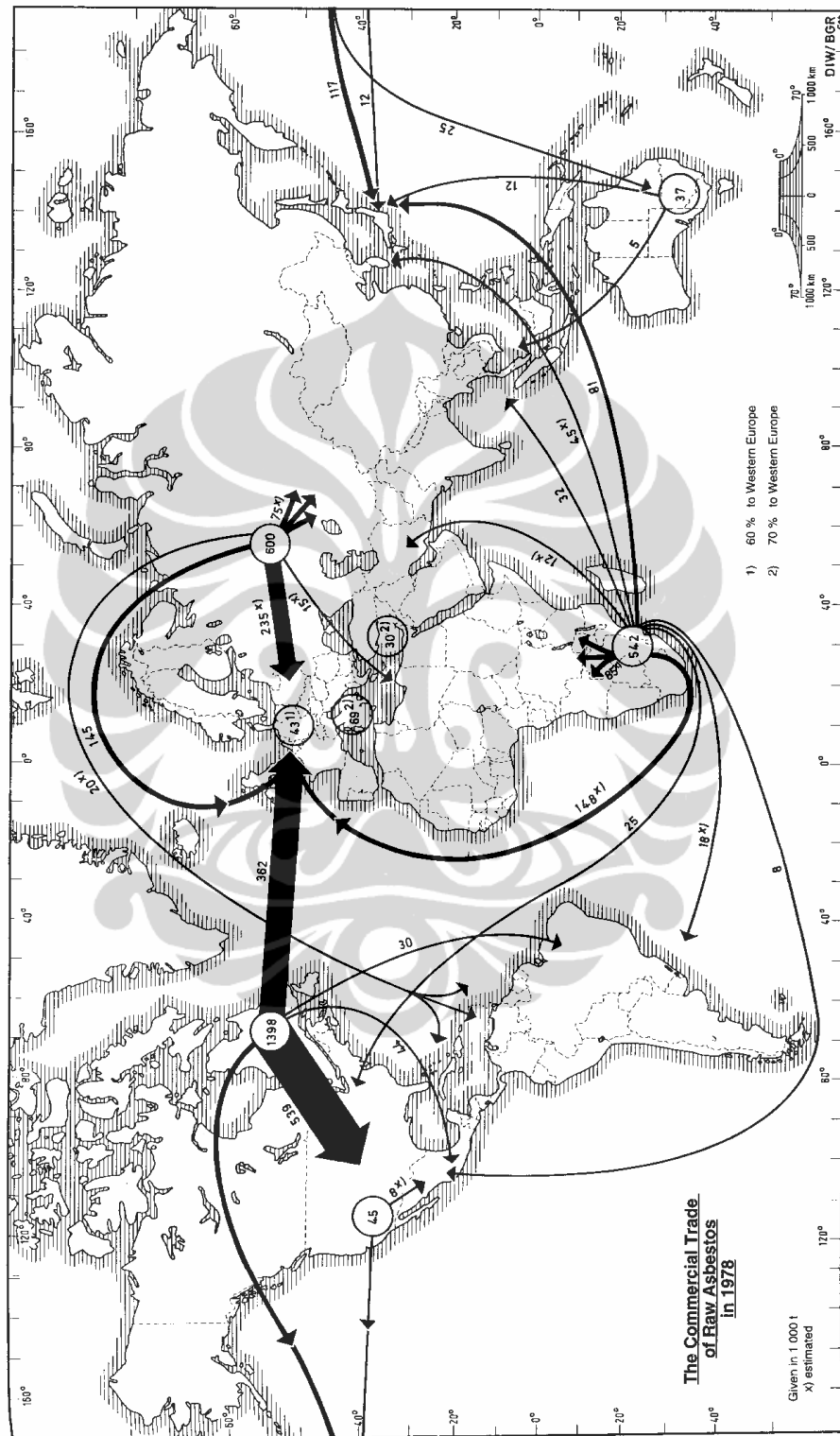
[Environ Health Perspect 112(3):285-290, 2004. © 2004 National Institute of Environmental Health Sciences]

Tabel 2. Jumlah rumah tangga yang memakai jenis plafon asbes putih menurut propinsi di Indonesia

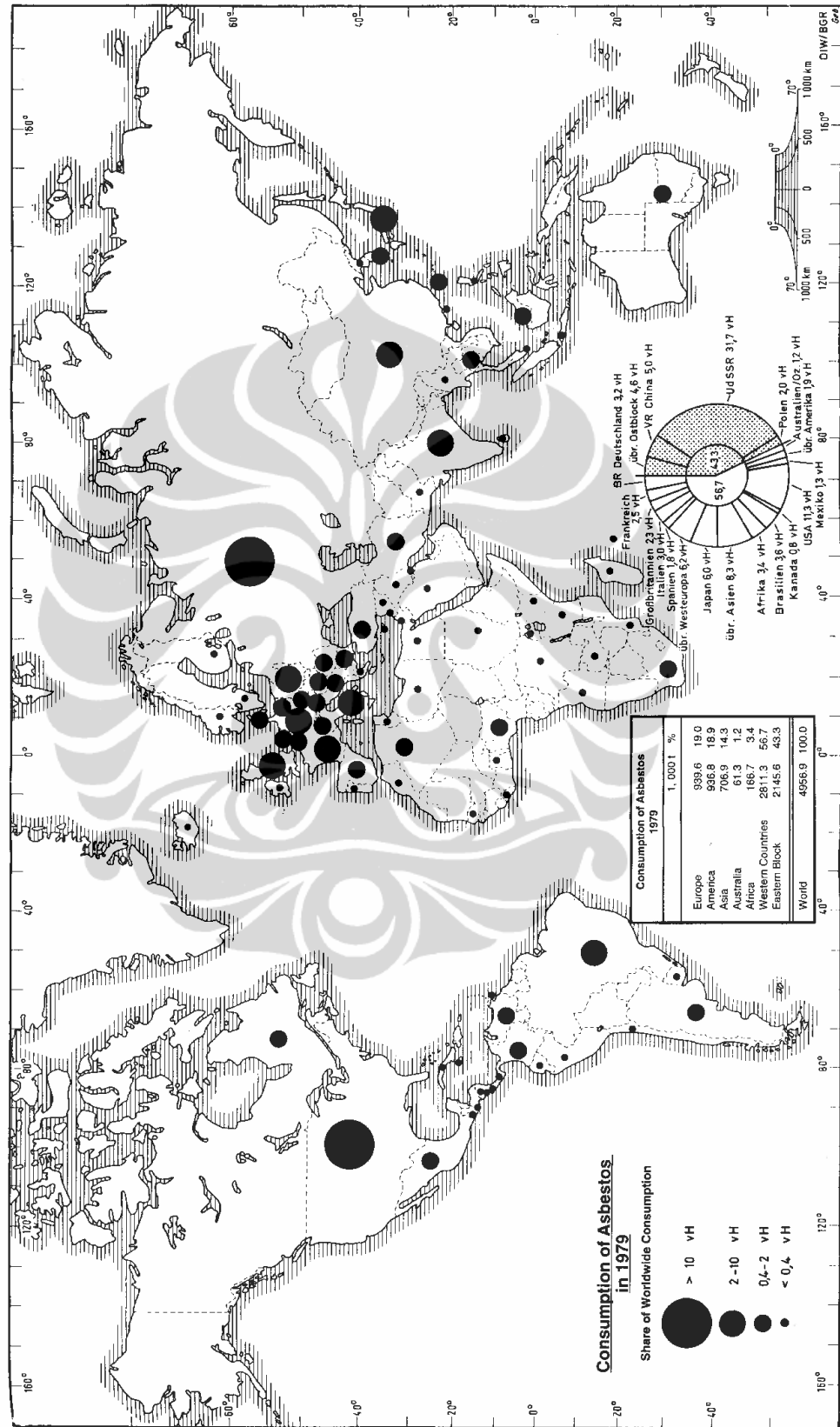
Provinsi	Asbes		Bukan Asbes		Tidak ada	
	(KK)	(%)	(KK)	(%)	(KK)	(%)
Aceh NAD	-	-	-	-	-	-
Sumatera Utara	860,061	32.84	598,163	22.84	1,160,810	44.32
Sumatera Barat	43,279	4.17	608,255	58.67	385,258	37.16
Riau	75,900	6.29	718,900	59.56	412,190	34.15
Jambi	9,477	1.56	298,243	49.01	300,811	49.43
Sumatera Selatan	35,410	2.36	728,361	48.66	732,887	48.97
Bengkulu	5,557	1.57	167,955	47.35	181,215	51.09
Lampung	14,827	0.89	388,131	23.49	1,249,212	75.61
Bangka Belitung	39,952	18.25	81,945	37.43	97,056	44.32
DKI Jakarta	417,823	18.16	1,667,840	72.49	215,123	9.35
Jawa Barat	1,974,957	20.16	6,584,720	67.20	1,239,561	12.65
Jawa Tengah	1,292,639	16.19	1,374,053	17.20	5,320,619	66.61
D.I. Yogyakarta	204,299	21.64	120,352	12.74	619,713	65.62
Jawa Timur	2,334,660	24.13	2,544,494	26.30	4,795,625	49.57
Banten	496,585	24.08	1,014,595	49.20	551,015	26.72
Bali	77,487	9.44	542,485	66.07	201,124	24.49
Nusa Tenggara Barat	21,889	2.17	526,209	52.20	459,980	45.63
Nusa Tenggara Timur	8,914	1.10	88,589	10.92	713,902	87.98
Kalimantan Barat	10,339	1.20	372,182	43.00	482,953	55.80
Kalimantan Tengah	3,132	0.64	215,436	44.15	269,455	55.21
Kalimantan Selatan	3,605	0.44	335,301	41.65	466,180	57.90
Kalimantan Timur	4,629	0.73	367,106	57.61	265,443	41.66
Sulawesi Utara	1,329	0.24	330,244	59.57	222,783	40.19
Sulawesi Tengah	1,792	0.36	123,653	25.29	363,554	74.35
Sulawesi Selatan	76,862	4.29	580,239	32.34	1,136,919	63.37
Sulawesi Tenggara	4,243	1.02	69,575	16.75	341,478	82.23
Gorontalo	4,045	1.80	95,036	42.29	125,655	55.91
Maluku						
Irian Jaya	10,774	2.17	156,310	31.49	329,295	66.34
INDONESIA	8,034,466	15.64	20,698,372	40.29	22,639,814	44.07

* Sumber: Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia

Lampiran 3. Jalur perdagangan asbes putih. 'The Commercial Trade of Raw Asbestos in 1978'.



Lampiran 4. Peta Konsumsi Asbes putih di dunia pada tahun 1979. 'Consumption of Asbestos'.



Lampiran 5. Deklarasi Vienna

Vienna Declaration

Declaration from the Building and Woodworkers International Asbestos Conference, made in Vienna, February 2008

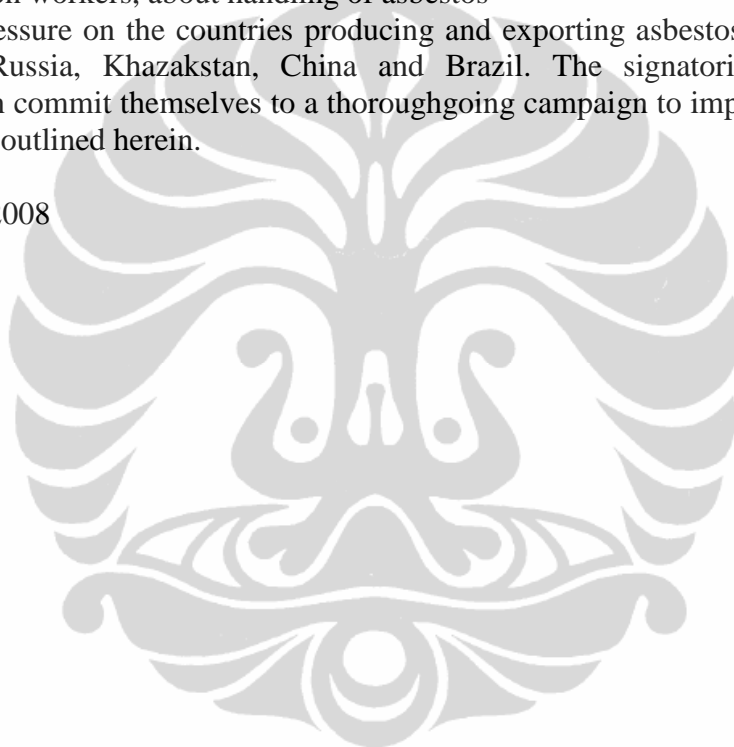
The Building and Woodworkers International (BWI) International Asbestos Conference in Vienna in February 2008, attended by representatives from Construction Trade Unions from 33 countries, the International Union of Building and Wood Workers (UITBB), the International Social Security Association, the International Association of Labour Inspectors and the International Ban Asbestos Secretariat, issue the following declaration. The organisations represented at the Vienna Conference are committed to promote the global ban of all forms of asbestos from the construction industry and from all other industrial sectors; to promote the effective regulation of work with in-situ asbestos in demolition, conversion, renovation and maintenance works by law; to work for the elimination of diseases caused by asbestos; to promote social justice for those affected by asbestos.

Considering that:

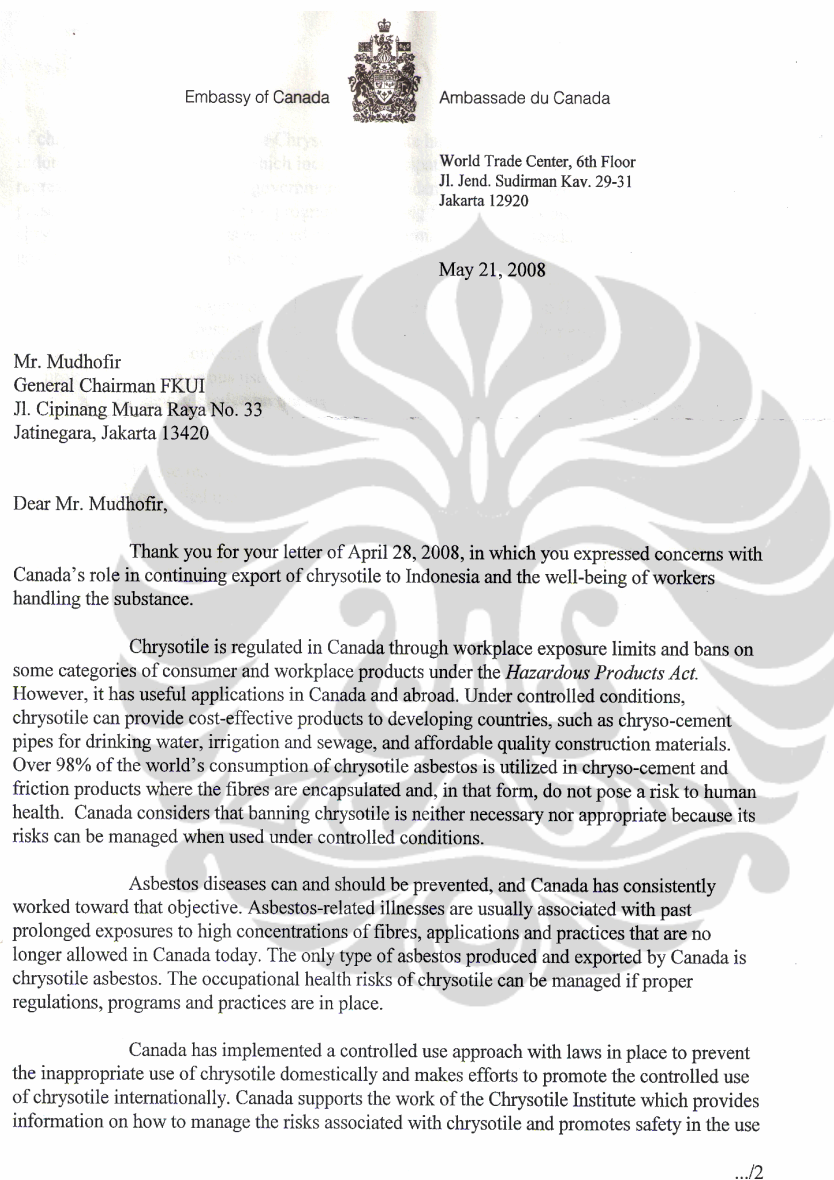
- All forms of asbestos, including chrysotile, are classified as known human carcinogens by the International Agency for Research on Cancer and by the International Programme for Chemical Safety, and recognised as such by the international scientific community;
- 90% of all asbestos produced is chrysotile
- 90% of chrysotile asbestos is used in asbestos cement materials;
- At least 100, 000 workers die every year from diseases caused by exposure to asbestos;
- It has taken three decades of efforts and the emergence of suitable alternatives for a comprehensive ban on the manufacture and use of asbestos and asbestos containing products to be adopted in more than forty countries. Furthermore that these countries now permit the handling of in situ asbestos only during asbestos removal, demolition, renovation and maintenance work carried out under strictly controlled working conditions;
- The most pressing concern is the situation concerning asbestos in the developing world with increasing consumption of chrysotile and weak regulatory and protection systems The organisations represented at the Vienna conference call upon the governments and social partners of all countries to:
- Take immediate steps to develop National Action Programmes for the Elimination of Asbestos Related Diseases, following the guidance of the International Labour Office and the World Health Organisation
- Take immediate steps to ban all mining, manufacture, recycling and use of all forms of asbestos and asbestos-containing materials as soon as possible.
- Undertake and support all measures intended to eliminate asbestos and asbestoscontaining products from the economic cycle and to replace asbestos with less harmful products.
- To protect employment of those currently employed in the asbestos cement sector through efficient reconversion of the industry

- Make the protection of workers against asbestos exposure a priority through Trade Union representation in the building sector and through effective public Labour Inspection
- Ratify and implement the provisions of ILO Convention 162 (1986), Safety in the Use of Asbestos, and to implement the provisions of its accompanying Recommendation 172 as a minimum standard not to be fallen below.
- Ensure proper compensation, medical treatment and support for the victims of asbestos related diseases
- Carry out an extensive mapping and registration of asbestos in buildings, trains, ships, water pipes with a view to prevention of exposure and the eventual controlled removal
- Put in place an information plan targeted in particular at younger and migrant construction workers, about handling of asbestos
- Increase pressure on the countries producing and exporting asbestos – namely Canada, Russia, Khazakstan, China and Brazil. The signatories to this declaration commit themselves to a thoroughgoing campaign to implement the objectives outlined herein.

7th February 2008



Lampiran 6. Surat dari Kedutaan Besar Kanada kepada FKUI SBSI pada tanggal 21 Mei 2008



Canada

/2

of chrysotile internationally. The Chrysotile Institute has held numerous information seminars in Indonesia from 1985 to 2006 which included participation by an important number of representatives from industry, governments and academia. The 2006 seminar included presentations by governments on programs providing for the responsible and safe use of chrysotile where participants received detailed information on the standards and regulations governing responsible use, including in Indonesia.

Canada supports the International Labour Organization (ILO) Convention 162 on Safety in the Use of Asbestos and encourages other countries to implement measures in compliance with the Convention, including the development and enforcement of national laws, the prohibition of dangerous uses, and the adoption of appropriate control measures. Indonesia has adopted a code of practice on the application of asbestos in the workplace which complies with the provisions of ILO Convention 162.

Please rest assured that Canada will continue to play its stewardship role in promoting the controlled use of chrysotile internationally. Thank you for sharing your views on this important issue.

Sincerely,



John T. Holmes
Ambassador

* Sumber: FKUI SBSI (Federasi Konstruksi, umum dan informal – Serikat Buruh Sejahtera Indonesia)

**Lampiran 7. Propinsi dan Teritori yang bergabung dalam konfederasi
Kanada dan tanggal bergabungnya**

No.	Tanggal	Nama Propinsi dan Teritori*
1	1 Juli 1867	 Ontario
		 Quebec
		 Nova Scotia
		 New Brunswick
5	15 Juli 1870	 Manitoba *
		 Northwest Territories
7	20 Juli 1871	 British Columbia
8	1 Juli 1873	 Prince Edward Island
9	13 Juni 1898	 Yukon *
10	1 September 1905	 Saskatchewan *
		 Alberta *
12	31 Maret 1949	 Newfoundland (Saat ini bernama Newfoundland and Labrador)
13	1 April 1999	 Nunavut *

* Sumber: Statistic Canada, <http://www.statcan.gc.ca>

Lampiran 8. Hasil Pemilihan Umum Federal Kanada, tahun 2008

Partai politik	Pemimpin partai	Jumlah kursi di 'The House of Commons'		Suara Populer	
		2008	% kursi	Jumlah suara	% suara
Konservatif	Stephen Harper	143	46,4%	5.208.796	37,65%
Liberal	Michael Ignatieff	77	25%	3.633.185	26,26%
Bloc Quebecois	Gilles Duceppe	49	15,9%	1.379.991	9,98%
New Democrats	Jack Layton	37	12,0%	2.515.561	18,18%
Green	Elizabeth May	-	-	937.613	6,78%
Independen		2	0,6%	94.844	0,69%
Christian Heritage	Ron Gray	-	-	26.475	0,19%
Marxist-Leninist	Anna Di Carlo	-	-	8.565	0,06%
Libertarian	Dennis Young	-	-	7.300	0,05%
Progressive Canadian	Sinclair Stevens	-	-	5.860	0,04%
Communist	Miguel Figueroa	-	-	3.572	0,03%
Canadian Action	Connie Fogal	-	-	3.455	0,02%
Marijuana	Blair Longley	-	-	2.298	0,02%
Neorhino.ca	Francois Gourd	-	-	2.122	0,02%
Newfoundland and Labrador first	Thomas Hickey	-	-	1.713	0,01%
First Peoples National	Barbara Wardlaw	-	-	1.611	0,01%
Animal Alliance	Liz White	-	-	527	0,00%

Environment Voters					
Work Less	Conrad Schmidt	-	-	425	0,00%
Western Block	Doug Christie	-	-	195	0,00%
People's Political Power	Roger Poisson	-	-	186	0,00%
Total		308	100%	13.834.294	100%

* Sumber: Elections Canada, <http://www.elections.ca/>

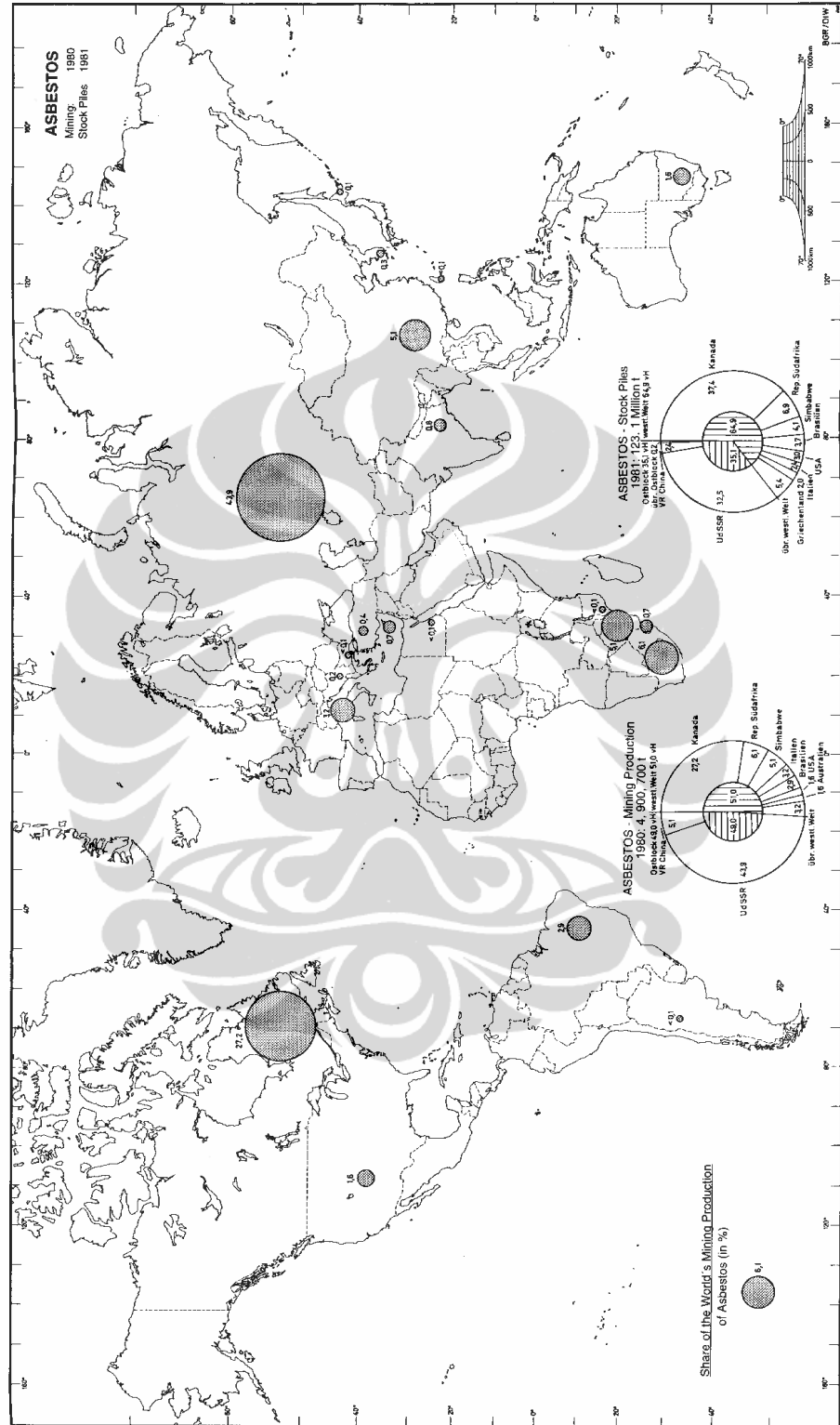


Lampiran 9. Hasil Pemilihan Umum di propinsi Quebec pada bulan Desember 2008

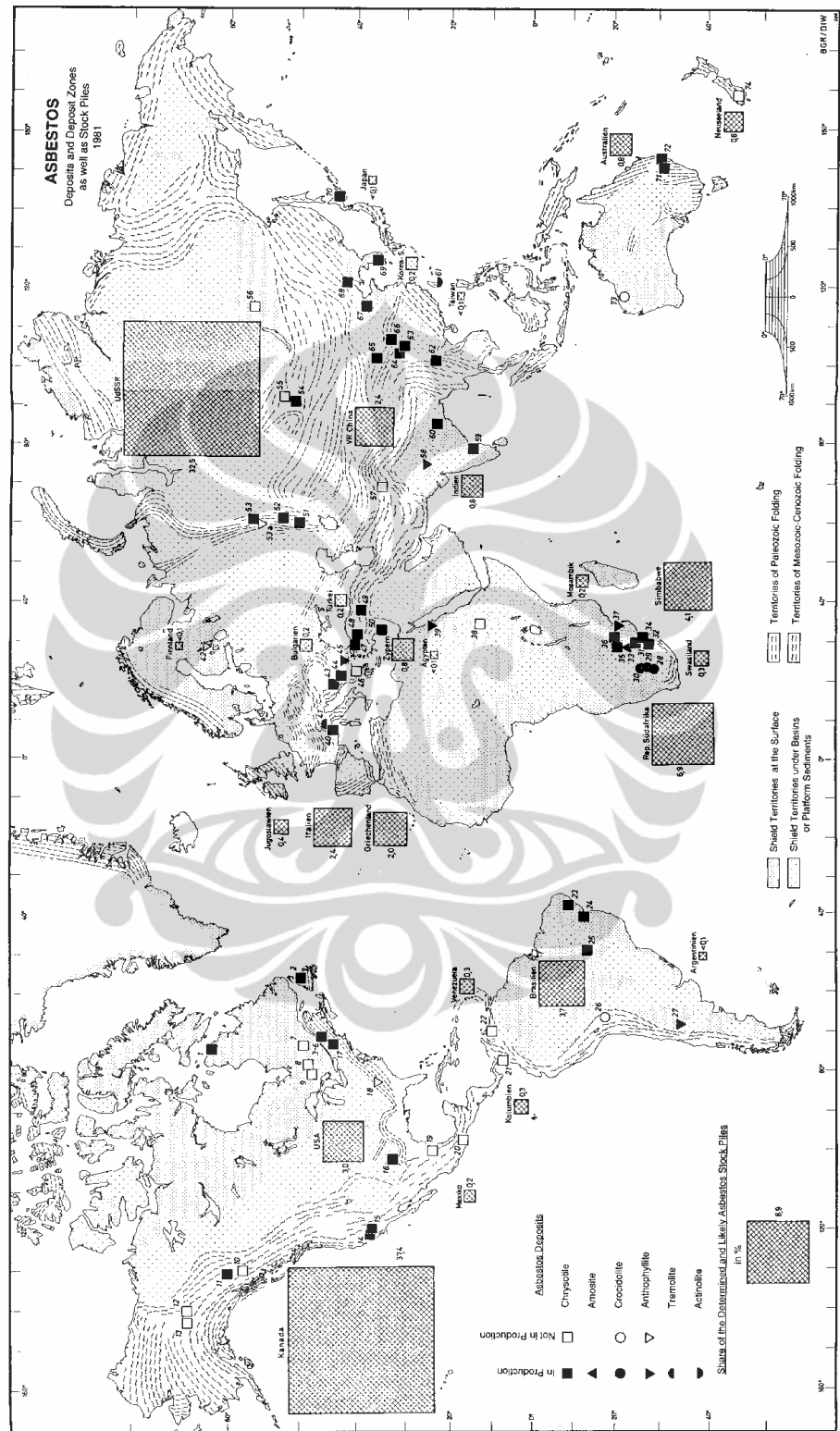
Partai politik	Pemimpin partai	Jumlah kursi di <i>'The National Assembly of Quebec'</i>		Suara Populer	
		2008	% kursi	Jumlah suara	% suara
Liberal	Jean Charest	66	52,8	1.366.046	42,08
Parti Quebecois	Pauline Marois	51	40,8	1.141.751	35,17
Action democratique du Quebec	Mario Dumont	7	5,6	531.358	16,37
Quebec Solidaire	Francoise David	1	0,8	122.618	3,78
Green	Guy Rainville	-	-	70.393	2,17
Parti independantiste	Eric Tremblay	-	-	4.227	0,13
Marxist- Leninist	Pierre Chenier	-	-	2.727	0,08
Durable	Sebastien Girard	-	-	567	0,02
Republic of Quebec	Gilles Paquette	-	-	140	0,01
Independen		-	-	6.506	0,09
Total		125	100	3.246.333	100

*Sumber: Elections Canada, <http://www.elections.ca/>

Lampiran 10. Peta nertambangan asbes di dunia 'share of the world's mining production'. tahun 1980



Lampiran 11. Peta deposit cadangan asbes putih di Kanada . 'deposit and deposits zone'. tahun 1981



Lampiran 12. Poster *International Scientific Symposium* di Jakarta, 1-2 Maret 2006

University of Indonesia
 Dept. Of Respiratory Medicine
Faculty of Medicine
 Dept. Of Occupational Health & Safety
Faculty of Public Health

INTERNATIONAL SCIENTIFIC SYMPOSIUM

CHRYSOTILE FIBER :
 RECENT RESEARCH.
 STRONG DATA & NEW REALITY

For **safe and responsible** use
 of chrysotile fiber

1 - 2 March 2006
 Golden Ballroom
 Hilton Hotel
 JAKARTA

ICA
 International Chrysotile Association

Canada

CHRYSOTILE
 ASSOCIATION

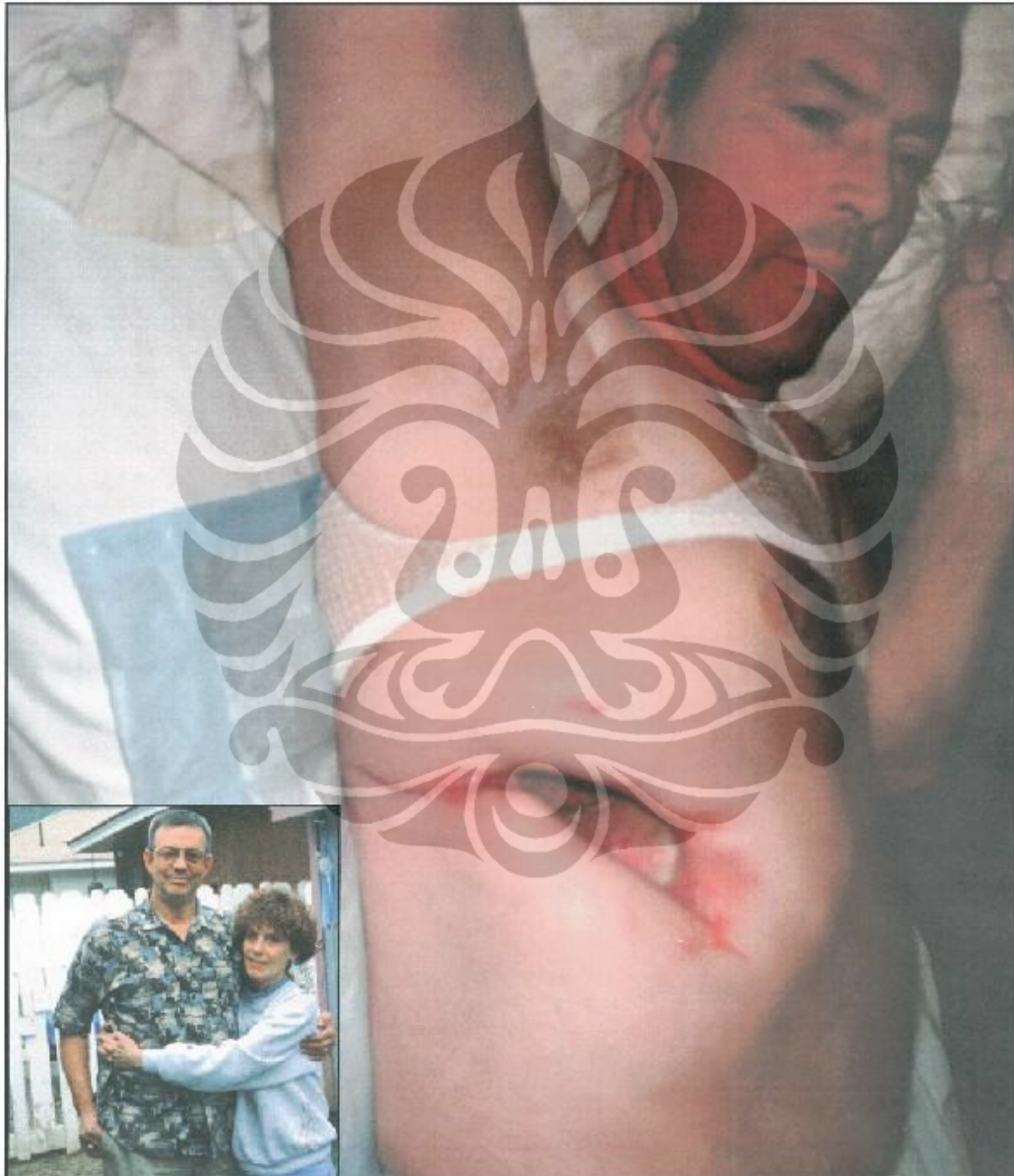
Please Bring This Invitation to be exchanged with The Symposium Kit

Lampiran 13 Foto salah satu penderita malignant mesothelioma

ASBESTOS: THE WHOLE TRUTH...

"Kaylo's light weight, pleasant handling, non-irritating and non-toxic nature contribute to workers well-being on the job."

Owens-Illinois, Inc. Asbestos promotional brochure, 1957.



LABOR POWER!



The Law Offices of Roger Worthington, P.C.
850-831-9399
214-522-6812
503-285-3925

"So this is what results from the companies who made asbestos! This should be happening to them, not my husband and too many other workers. This is a **rotten dirty deal!**"

—Ruby Smith, wife of Delmer Smith, 56 year old Alcoa Aluminum worker with malignant mesothelioma.

Universitas Indonesia

Lampiran 14 Catatan Bank Dunia ‘Good Practice Note: Asbestos: Occupational and Community Health Issues’

World Bank Group
May 2009

Good Practice Note: Asbestos: Occupational and Community Health Issues

1. SUMMARY

The purpose of this Good Practice Note is to increase the awareness of the health risks related to occupational asbestos exposure, provide a list of resources on international good practices available to minimize these risks, and present an overview of some of the available product alternatives on the market. The need to address asbestos-containing materials (ACM) as a hazard is no longer under debate but a widely accepted fact.

Practices regarding asbestos that are normally considered acceptable by the World Bank Group (WBG) in projects supported through its lending or other instruments are addressed in the WBG’s General Environmental, Health and Safety (EHS) Guidelines.¹ This Good Practice Note provides background and context for the guidance in the WBG EHS Guidelines.

Good practice is to minimize the health risks associated with ACM by avoiding their use in new construction and renovation, and, if installed asbestos-containing materials are encountered, by using internationally recognized standards and best practices (such as those presented in Appendix 3) to mitigate their impact. In all cases, the Bank expects borrowers and other clients of World Bank funding to use alternative materials wherever feasible.

ACM should be avoided in new construction, including construction for disaster relief. In reconstruction, demolition, and removal of damaged infrastructure, asbestos hazards should be identified and a risk management plan adopted that includes disposal techniques and end-of-life sites.

